

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
17-10-2021	17-11 s/d 25-12-2021	27-12-2021	27-01-2022	29-01-2022

Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.1, Januari 2022 (44-55)

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

Rekognisi Sosial Pada Komunitas Minang Persatuan Keluarga Peninggahan dalam Pembentukan Politik Identitas di Palembang

Ines Sindi Fantika Fulva

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: Reksisaputra569@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out how the discourse of identity in the Minang Community is and to find out how the behavior patterns and what actions are taken by the Minang ethnic in obtaining recognition from other residents who come from ethnic backgrounds in the city of Palembang.

The research method used in this thesis is a qualitative research with a descriptive approach that has steps in its implementation, starting with a problem, determining the information needed, determining the procedure for collecting data through observation or observation, managing information or data and drawing research conclusions. The theoretical basis in this thesis is the theory of identity politics from Klaus Von Beyme, the theory of multiculturalism from Taylor.

The results of this study indicate that Social Recognition in the Minang Community in the Formation of Identity Politics, namely in obtaining recognition from the community, the Minang ethnic tries to introduce Minang cultural customs in Sako Palembang, and is welcomed by the surrounding community.

Keywords: *politic identity, community, minang in palembang*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana diskursus identitas dalam Komunitas Minang dan untuk mengetahui bagaimana pola perilaku dan tindakan apa saja yang dilakukan etnis minang dalam memperoleh pengakuan dari penduduk lain yang berasal dari latar etnis yang berada di kota Palembang.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang memiliki langkah-langkah dalam pelaksanaannya, diawali dengan adanya masalah, menentukan informasi yang diperlukan, menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan penelitian.. Landasan teori dalam skripsi ini adalah teori politik identitas dari Klaus Von Beyme, teori multikulturalisme dari Taylor.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rekognisi Sosial Pada Komunitas Minang

Dalam Pembentukan Politik Identitas yaitu dalam memperoleh pengakuan dari masyarakat, etnis minang berusaha mengenalkan adat budaya minang di sako palembang, dan disambut baik oleh masyarakat sekitar.

Keywords: *politik identitas, komunitas, minang di palembang*

PENDAHULUAN

Politik identitas merupakan salah satu politik kultural yaitu pengakuan akan kesetaraan nilai-nilai kultur yang berbeda-beda sebagai dasar universal yang dibutuhkan bagi suatu penerimaan tak bersyarat. Politik identitas memperlihatkan sebuah ekspresi mengenai begitu kompleksnya kebutuhan manusia akan perasaan penerimaan dan memiliki (*sense of belonging*). Politik identitas dapat dikatakan sebagai tindakan politik untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas, atau karakteristik, baik berbasis pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. (Indah Sari, 2020)

Jati diri manusia tidak dapat dipisahkan dari identitas kolektif, namun identitas kolektif tak pernah boleh melegitimasi penindasan atas individu-individu subyek multikultural hanya mungkin berkembang menuju pemenuhan jati dirinya jika ditopang dengan pilar-pilar intersubjektif seperti pengakuan, respek dan penghormatan dari orang lain.

Menuntut pengakuan dari orang lain dalam kehidupan sosial membuat suatu masyarakat mengadakan politik identitas, yang dimaksudkan agar mendapat pengakuan dari masyarakat. Mempertahankan identitas sebagai pembentuk dari daerah asal bahwa seseorang mempunyai ciri khas dan kebiasaan yang dimiliki sebagai hal yang telah terbentuk di dalam diri seseorang. Ciri dan kebiasaan ini akan terus dijaga dan diterapkan dalam berkehidupan sosial, namun ketika seseorang tersebut itu berpindah ke tempat lain dengan lingkungan, kebiasaan, dan adat yang berbeda, tentu jika tidak ada bentuk pertahanan seseorang tersebut akan dipengaruhi oleh lingkungan barunya, lambat laun identitas diri yang ia bawa dari tempat ia berasal akan terdistruksi, apalagi di suatu tempat baru menjadi suatu kebiasaan, identitas yang minoritas.

Pengaruh kelompok mayoritas terhadap minoritas biasanya sudah menyentuh hal-hal yang sangat prinsip kelompok yang sudah menjadi hak asasi bagi komunitas yang dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Dalam hal keyakinan beragama misalnya, apa yang diyakini sebagai kebenaran oleh kelompok mayoritas sebagai suatu keyakinan beragama yang normatif dan profan, harus dihormati oleh kelompok minoritas sebagai suatu kebenaran yang tidak terbantahkan.

Sebaliknya, apabila kelompok minoritas memiliki keyakinan beragama yang berbeda dengan kelompok mayoritas, maka mereka dianggap sebagai kelompok masyarakat yang telah melawan keyakinan arus utama sehingga berbagai tindakan provokatif dan refresif sering mereka peroleh dari kelompok mayoritas seperti pelabelan sebagai kelompok sesat, diskriminasi dalam hal akses pada pelayanan publik, pemasangan kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan, bahkan sampa pada tindakan-tindakan brutal seperti membakar rumah ibadah, penyerangan dan pembantaian terhadap komunitas tertentu yang semua itu merupakan suatu tindakan yang tidak pernah dibenarkan oleh agama dan keyakinan apapun.

Kesenjangan jarak antara kelompok mayoritas dan minoritas ini tentu akan menjadi suatu sandungan tersendiri demi terciptanya kestabilan pembangunan nasional dalam kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan berkeyakinan dalam bingkai

negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk meretas mayoritas dan minoritas sebagai modal hidup bersama perlu digalangkannya melalui berbagai perspektif yang salah satunya adalah politik identitas. Oleh sebab itu rekognisi sosial perlu didapatkan guna membentuk sebuah politik identitas. Seperti yang diketahui rekognisi memiliki arti yaitu pengakuan. Karena keberadaan suatu komunitas membutuhkan pengakuan dari masyarakat agar dapat bertahan ditengah beragamnya komunitas yang lain. Dalam hal ini tentunya perlu adanya kegiatan atau aktivitas yang dapat membentuk rekognisi awal. Adapun kegiatan tersebut, meliputi pembentukan sebuah organisasi kemasyarakatan, kemudian aktif dalam kegiatan di masyarakat, dan banyak berinteraksi dengan masyarakat sekitar.

Terbentuknya komunitas masyarakat Minang yang pada awalnya datang ke Kota Palembang sebagai etnis yang minoritas sebagai perantau sebagaimana etos merantau orang Minangkabau sangatlah tinggi, bahkan diperkirakan tertinggi di Indonesia. Budaya merantau yang tidak terlepas bagi masyarakat Minang kabau, sebagaimana hadirnya masyarakat-masyarakat Minang hampir di seluruh sentero Indonesia bahkan samapi ke manca Negara. Merantau ke negeri orang membuat masyarakat Minang butuh akan memepertahankan identitas diri mereka sebagai masyarakat Minang.

Budaya Minangkabau yang tercermin dalam bentuk pepatah-petitih, petuah, tambo, dan kaba, sebagai refleksi simbolik makna kehidupan dan lingkungan social serta alam yang mengelilingi mereka yang menghasilkan nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dengan daerah lainnya. Nilai dasar yang menjadi pegangan masyarakat Minangkabau adalah mereka pertama kali harus belajar dari pengalaman, dari pengalaman inilah mereka belajar dari alam yang memantulkan aspek keteraturan dan keseimbangan serta perubahan yang menjadi arah kehidupan tentang apa yang harus dilakukan dan diperbuat dalam proses menghadapi tujuan dan makna hidup sebagai masyarakat Minangkabau. Sistem nilai budaya berfungsi sebagai pedoman dan pendorong perilaku manusia. Sistem nilai budaya juga memberi arah kepada anggota-anggota suatu masyarakat.

Masyarakat Minangkabau terkenal dengan kegiatan merantau. Hal ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu, baik untuk berdagang, bekerja maupun bersekolah. rantau adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Bahkan ia menjadi identitas sosial, sehingga marantau adalah keniscayaan yang harus mereka lakukan. Seorang laki-laki dianggap tidak berguna di kampung halamannya jika belum pergi merantau, adalah aib bagi seorang laki-laki bila telah menginjak usia dewasa belum pula pergi merantau menempa diri menjadi lebih baik. (Ridho, 2020)

Dilansir dari tribunnews.com orang Minang yang berada di Palembang membentuk sebuah organisasi masyarakat yang diberi nama Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) Minang. Tujuannya mendongkrak roda perekonomian masyarakat minang yang ada di Sumsel. Selama ini masyarakat minang memiliki berbagai latar belakang profesi, sehingga kehadiran badan usaha ini menjadi wadah bagi warga minang dalam mengembangkan usaha. Pada pelantikan kepengurusan. Dalam kesempatan tersebut OSO mendapatkan penghargaan ketua umum PKP minang yang juga didaulat sebagai Datuk Bandaro Sutan Nan Kayo. OSO mengapresiasi atas kehadiran 700 warga Minang, ini membuktikan warga minang sangat baik dalam menjalin silaturahmi antar sesama. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui proses dan tindakan apa saja yang dilakukan kelompok Minang agar mendapatkan pengakuan dan mendapatkan haknya agar sama dengan penduduk pendatang lainnya, dan bagaimana pendekatan yang

dilakukan kelompok Minang dengan pendatang lainnya sehingga mereka tidak pernah mengalami konflik dan dapat hidup berdampingan dengan aman dan damai, dan bagaimana peran Negara dalam menghadapi kaum minoritas.

Sehingga pada masyarakat-masyarakat Minang yang sudah menjadi tradisi mereka merantau, dalam mempertahankan identitas diri mereka agar identitas diri sebagai orang minang tetap melekat pada diri mereka dan tetap hidup dalam kehidupan sosial. Masyarakat Minang sebagai perantau di kota Palembang tentu takut jika identitas diri dan budaya-budaya Minang yang telah lama mereka terapkan dalam kehidupan terdistrupsi dan lambat laun pudar karena adanya pengaruh dari tempat baru (budaya dan kebiasaan setempat). Upaya tetap menjalankan dan menerapkan identitas diri selaku masyarakat Minang di tempat baru tentu tidak mudah karena berbedanya kultur tempat baru dan daerah asal, mencari pengakuan dari tempat baru bahwa identitas diri yang sudah melekat dalam diri seseorang yang tidak mungkin selalu dapat dilakukan seorang diri, sehingga perlu adanya upaya untuk mempertahankan identitas diri selaku masyarakat Minang yang merantau, hal ini membuat masyarakat Minang yang ada di kota Palembang tentunya melakukan politik identitas agar mereka dapat diakui sebagai kelompok yang mempunyai identitas diri sendiri yakni selaku masyarakat Minang.

Masyarakat kota Palembang yang mempunyai kebudayaan dengan sumber muasalanya dari kerajaan Sriwijaya yang tetap diwariskan secara turun temurun. Kesultanan Palembang yang tetap terjaga hingga sampai saat ini. Sebagai masyarakat yang mendiami daerah Sumatera bagian Selatan. Kekhasan budaya Palembang yang biasa terlihatpun dari nama seseorang maupun dari logat bahasa.

Rekognisi sosial ini bagaimana caranya masyarakat Minang dapat diterima, dalam halnya ditilik dari segi Politik identitas sebagai cara yang perlu diperhatikan lebih lanjut hal apa saja yang menjadi aktualisasi strategi politiknya.

Agar mendapatkan pengakuan dari masyarakat kota Palembang warga Minang dalam melakukan rekognisi sosial mengadakan politik identitas. Politik identitas ini dimaksudkan agar budaya-budaya Minang dapat tetap diterapkan oleh kelompok Minang yang berada di kota Palembang, sebagai warga pendatang yang merantau dari daerah asalnya Minang. Mengadakan politik identitas diri ini, perlunya usaha dari kelompok Minang untuk mengadakan tindakan atau bentuk kegiatan-kegiatan yang mampu memperkenalkan budaya Minang kepada kelompok mayoritas yang menduduki kota Palembang. Politik identitas sendiri sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan diri di lingkungan sosial masyarakat, dengan politik identitas ini masyarakat Minang dapat diakui dan mempunyai kekuatan identitas di kota Palembang.

Politik identitas dalam mencari pengakuan dan dukungan ini tentu saja mengadakan suatu kegiatan yang mengangkat citra dan nama serta dukungan baik dari sesama mereka yang mempunyai identitas yang sama maupun dari kelompok mayoritas setempat. Kegiatan-kegiatan yang tidak hanya berbasis penggelaran budaya namun juga diadakannya pendidikan, pelatihan, dan pengaplikasian di masyarakat yang dituntun dengan instruktur bagi para regenerasi mereka sebagai warga pendatang yang memiliki jumlah minoritas. Kemudian pengakuan dan dukungan yang harus dipatenkan ini perlu adanya suatu bentuk pengakuan secara simbolis dan tertulis oleh tokoh atau pejabat kota Palembang dapat menjelaskan bahwa penerimaan sesungguhnya bagi masyarakat Palembang terhadap hadirnya kelompok komunitas Minang yang ada di Palembang. Identitas selaku masyarakat Minang yang ada di kota Palembang dengan melakukan politik identitas dapat terus dirasakan oleh masyarakat Minang yang ada di Palembang

khususnya dan bagi masyarakat Palembang adanya warga pendatang yang dalam hak berkebudayaannya perlunya dihargai dan diterima.

Berfokusnya kajian ini terhadap rekognisi sosial kelompok Minang dalam pembentukan politik identitas yang ada di Kota Palembang. Sekelompok pendatang yang memiliki jumlah yang lebih sedikit, memiliki budaya dan kepercayaan terhadap keinginan yang berbeda dengan identitas dirinya sebagai penduduk pendatang yang lebih awal menempati Kota Palembang ataupun Penduduk asli Kota Palembang. Banyaknya perbedaan dan ketidak sesuaian dengan identitas aslinya sebagai asal mereka lahir sehingga mereka membentuk komunitas yang bisa mengingatkan dan mempertahankan identitas diri awal mereka yang mereka bawa dari daerah asal mereka, agar mereka tetap mempunyai identitas diri meskipun tidak lagi berada di tanah kelahiran.

TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan Pustaka merupakan unsur penting dari proposal penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan posisi masalah yang akan diteliti di antara penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain dengan maksud untuk menghindari tidak terjadi duplikasi (plagiasi) penelitian. Mengembangkan kerangka berpikir dalam penelitian ini dan sebagai landasan berpikir, saya merujuk beberapa penelitian terdahulu agar dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisa penelitian yang saya lakukan. Adapun penelitian terdahulu ini tidak adanya ditemukan judul yang sama. Sebagai bahan referensi kajian pada penelitian terdahulu berupa skripsi dan jurnal, terkait penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama, Irfan Zharfandy dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh identitas terhadap pemilihan pasangan calon pada pemilihan gubernur Sulawesi Selatan tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan masih berkembangnya politik identitas disebabkan karena adanya tiga faktor, yaitu: pertama, masyarakat hierarkis (patron-klien). Kedua, polarisasi politik oleh elite lokal. Ketiga, regulasi pemerintah (kebijakan desentralisasi dan pemilihan umum). (Zharfandy, 2016)

Kedua, Min Hajul Abidin dalam skripsi yang berjudul “Politik Identitas Santri”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik identitas yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kedua subjek mengembangkan kapasitas politiknya melalui perjuangan parlemen maupun strategi politik *amoeba* dengan menyebar ke pos-pos strategis. Selain itu ada identitas unik yang dimiliki santri saat terjun dalam politik, dimana identitas sebagai santri merupakan kebanggaan karena memiliki nilai lebih dari pada politisi lain yang terjun dalam dunia politik. Selain hal tersebut politik juga dianggap sebagai jalan ibadah dan *khodamul ummah* bukan semata-mata karena jabatan. (Abidin, 2017)

Ketiga, Wira Rikho Shandi dalam skripsi yang berjudul “Politik Identitas Partai Islam (Studi Partai Keadilan Sejahtera)”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif yakni studi Pustaka yang coba mengidentifikasi Partai Keadilan Sejahtera sebagai sebuah partai Islam, apakah benar sudah menajalankan prinsip-prinsip yang ada pada partai Islam atau hanya menjadikan asas Islam semata guna merebut simpati mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera sudah mencirikan nilai dan prinsip partai Islam. Dibuktikan dengan Islam sebagai asas partai, memandang Islam adalah solusi konkrit yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat Indonesia menjadikan Islam Rahmat semesta,

sesuai dengan Islam tuntunanya Al-Qur'an dan Sunnah nabi. Kemudian dalam pergerakannya Partai Keadilan Sejahtera menggunakan metode dakwah (pembinaan) kadernya, proses pembinaan yang berbentuk halaqah cukup efektif dalam pembentukan karakter Islami bagi kader-kader Partai Keadilan Sejahtera. (Shandi, 2014)

Keempat, Syafwan Rozi dalam disertasi yang berjudul "Konstruksi Identitas Agama dan Budaya Etnis Minangkabau di Daerah Perbatasan (Perubahan Identitas dalam Interaksi Antaretnis di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)". Disertasi ini membahas tentang munculnya perubahan identitas agama dan etnis di daerah perbatasan di Sumatera Barat. Fokus penelitian adalah pada interaksi antaretnis, antara orang-orang Minangkabau dan kelompok etnis lain di daerah perbatasan Rao, Pasaman. Penelitian ini menemukan bahwa hubungan sosial di daerah perbatasan terjadi dalam bentuk hubungan individu antara masyarakat Minangkabau dengan orang-orang Mandailing. Komunitas ini terlibat dalam proses kontak budaya, konflik atau persaingan, akomodasi, asimilasi, adaptasi, akulturasi, negosiasi dan kontestasi dalam interaksi sosial mereka. Penelitian ini menegaskan bahwa proses interaksi memengaruhi perubahan identitas agama dan budaya. Pembangunan budaya etnis Minangkabau dan budaya agama di daerah perbatasan membentuk identitas baru yang merupakan sintesis dari proses panjang interaksi sosial. Pembangunan identitas agama dan budaya membentuk model pencegahan konflik agama dan etnis.

Kelima, Andy Prima Sahalatua dalam skripsi yang berjudul "Politik Identitas dalam Pemilihan Daerah (Studi Kasus pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022)". Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa para elite politik dan calon kepala daerah, seolah sengaja memelihara atau memainkan politik identitas itu, untuk kepentingan politik dan hegemoni kekuasaan. Hal ini berdampak pada realitas politik di pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu dengan identitas tertentu, calon kandidat bisa melakukan posisi, ini menunjukkan factor etnis dan agama cukup signifikan untuk mendapatkan dukungan dan mempengaruhi pilihan masyarakat dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. (Sahalatua, 2018)

METODE PENELITIAN

Metodologi secara umum adalah cara seorang peneliti melakukan penelitian, yaitu cara dimana peneliti memilih untuk berurusan dengan pertanyaan tertentu (yang konsekuensinya dapat berdampak pada definisi masalah). Peneliti harus mempertimbangkan cara untuk berurusan dengan orang-orang dalam organisasi dan menetapkan pendekatan keseluruhannya, dengan memilih bagaimana peneliti akan melakukan penelitian. (Jan Jonker, dkk, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang dilaksanakan di komunitas minang Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) sejak 17 Juni 2021 dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara mendalam (depth interview) dengan para informan, melakukan observasi langsung, serta dokumentasi. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria informan adalah benar-benar mengetahui dan terlibat langsung dalam kegiatan yang ada di komunitas minang Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP). Selain itu informan setidaknya telah bergabung dan aktif di komunitas minang Persatuan Keluarga

Paninggahan (PKP) sekurang-kurangnya satu tahun. Sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang tepat dan terpercaya.

Komunitas minang Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) merupakan suatu komunitas yang bertempat di Sako Perumnas Kota Palembang yang berupaya menjaga adat dan budaya di rantau yang terfokus dibidang pendidikan, keagamaan, budaya, dan dibidang sosial. Salah satu cara yang dilakukan komunitas minang Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) untuk mewujudkan persatuan adalah dengan cara mengajak dan mengenalkan budaya minang pada masyarakat untuk sama-sama menjalankan budaya minang di rantau. Keberadaan minang Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) bukan hal yang asing lagi, khususnya di kota Palembang.

Organisasi beridentitas Minang berfungsi untuk mengikat dan mensosialisasikan budaya di antara masyarakat sehingga muncul kecintaan dan kebanggaan menjadi orang Minang. Dalam perkumpulan ini diajarkan berbagai macam konsep, nilai, dan norma budaya Minang dan berbagai macam tari, Bahasa Minang, jaringan sosial komunitas yang tersebar di berbagai provinsi di seluruh Indonesia, bahkan ada di luar negeri. Bila dibandingkan dengan orang tua mereka yang berumur rata-rata 40 tahun keatas, faktor komunitas PKP dapat berperan besar dari faktor-faktor lainnya dalam membangun diskursus identitas.

Orang Minang yang berada di Palembang membentuk sebuah organisasi masyarakat yang diberi nama Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) Minang. Tujuannya mendongkrak roda perekonomian masyarakat minang yang ada di Sumsel. Selama ini masyarakat minang memiliki berbagai latar belakang profesi, sehingga kehadiran badan usaha ini menjadi wadah bagi warga minang dalam mengembangkan usaha. Pada pelantikan kepengurusan. Dalam kesempatan tersebut OSO mendapatkan penghargaan ketua umum PKP minang yang juga didaulat sebagai Datuk Bandaro Sutan Nan Kayo. OSO mengapresiasi atas kehadiran 700 warga Minang,

Komunitas ini bernama Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) merupakan sekumpulan warga minang di wilayah Sako kota Palembang. PKP adalah komunitas ikatan keluarga yang bersifat sosial, bebas, bertanggung jawab, mandiri, demokratis, amanah, serta mengutamakan kesetiakawanan dan kekeluargaan.

Awal Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) ini terbentuk, berangkat dari perkumpulan atau ikatan keluarga yang sering melakukan pengajian dan arisan yang diadakan dari rumah kerumah, yang dimaksud dengan ikatan keluarga disini ialah perkumpulan yang didasarkan masih memiliki hubungan keluarga atau kerabat dekat dari kampung halaman di Sumatera Barat. Tujuan awal perkumpulan ini ialah sebagai pengikat tali persaudaraan antar sanak saudara yang berada di wilayah Sako Kota Palembang.

Selain sebagai pengikat tali silaturahmi pengajian ini juga mengangkat tradisi tanah leluhur adat Minangkabau, karena pada dasarnya masyarakat minangkabau tidak terlepas dari syariat agama islam. Seperti dalam pepatah minang “Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Yang artinya adat bersanding dengan agama, agama bersanding dengan kitab (Al-Qur’an), masyarakat yang lahir dengan rasa taqwa kepada Allah dan Muhammad sebagai Rasul.

Lambat laun pengajian yang sering dilakukan, makin lama semakin banyak jamaahnya yang mempunyai minat dan keinginan untuk mengikuti pengajian, dari mulut ke mulut antar sesama masyarakat Minang. Masyarakat Minang tidak suka tika dipanggil dengan sebutan orang Padang, itu dikarenakan orang Minang sudah pasti beragama Islam, dan orang Padang belum tentu beragama Islam.

Adanya hal demikian menjadikan banyaknya anggota yang mengikuti pengajian ini, maka dibentuklah suatu komunitas Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) Palembang dan mempunyai tujuan sebagai pengikat tali silaturahmi antara masyarakat Minang yang satu dengan yang lainnya. Sebagai penyemangat cinta akan negeri dan nilai budaya luhur khususnya adat Minangkabau.

Hingga kini komunitas Minang Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) beranggotakan dari berbagai keluarga yang dibentuk sebagai wadah para perantau yang ada di wilayah Sako Kota Palembang untuk menjalankan tradisi, karena rindu dengan kampung halaman dan untuk saling dapat tolong menolong dan saling bekerja sama satu sama lain.

Dengan bertujuan untuk mewujudkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, silaturahmi, dan kekerabatan sesama perantau ranah minang di Palembang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan warga lainnya ditanah rantau. Kepengurusan pada PKP sifatnya tidak permanen, dalam 3 tahun sekali selalu diadakan pergantian kepengurusan. Hal ini bertujuan untuk mengganti cara-cara lama agar lebih kreatif dalam pergantiannya dan agar generasi muda dapat merasakan dan mengembangkan komunitas khususnya fasilitas sarana maupun prasarana yang telah ada.

Diskursus identitas dalam komunitas masyarakat Minang di Kota Palembang

Politik identitas merupakan politik yang fokus kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaannya yang didasarkan asumsi-asumsi fisik tumbuh, politik etnisitas atau primordialisme. Dalam proses penelitian ini dimana salah satunya adalah kegiatan observasi lapangan dengan didasarkan pada pengamatan, maka diperoleh suatu gambaran mengenai diskursus identitas dalam masyarakat Sako Kota Palembang di komunitas Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP).

Penggunaan Bahasa Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan rumah tangga maupun lingkungan pergaulan dengan sesama kawan atau orang Minang merupakan identitas etnis yang signifikan dalam memelihara nilai-nilai Minang tetapi juga menghidupkan 'raso pareso' filosofi adat istiadat Minangkabau dan ajaran agama Islam. Tanpa mengatakan aku orang Minang sudah terlihat identitas yang muncul di setiap individu orang Minang.

Diskursus di dalam masyarakat tentu membutuhkan etika agar masyarakat yang melakukan diskursus terhadap masyarakat lain supaya identitas bawaan yang dianut dapat diterima, dalam hal ini ada teori yang dikemukakan Jurgen Habermas dalam karyanya yang berjudul *Moral Consciousness and Communicative Action*, etika diskursus bukanlah pendasaran sebuah etika yang biasa ditemui dalam wacana etika tradisional pada umumnya. Etika diskursus merupakan metode untuk memastikan kembali arti norma-norma moral yang dipertanyakan. Pada pemaknaan etika diskursus dari prinsip yang dikemukakan Jurgen Hebermas yang dikutip dari Hardiman bahwa "orang yang berkomunikasi untuk saling pemahaman akan respek terhadap partnernya, sebagai satu "aku" yang lain. Namun komunikasi itu sendiri sudah mengantisipasi satu "kita", sehingga dalam komunikasih intersubjektif "aku" dan "kita" itu setara, karena keduanya memiliki asal usul yang sama, yakni komunikasih itu sendiri".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui diskursus identitas pada masyarakat Palembang dalam memandang etnis Minang bahwasanya atribut identitas dan kultural berperan sebagai perekat dari kolektivitas kelompok dari setiap orang yang menjadi atribut identitas dan nilai-nilai kultural yang dianggap melekat dalam identitas. Maka dari itu etnis Minang melakukan komunikasi di lingkungan setempat dan

mengorganisir kelompok mereka dengan etika diskursus. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Jurgen Hebermas dalam hal aplikatifnya berusaha memperkenalkan adat budayanya dengan tetap memperhatikan etika norma didalam lingkungan yang mayoritas non etnis Minang dan menjalin komunikasi, dan dari PKP inilah etnis Minang dikota rantau tetap bisa menjaga adat budaya dan saling bersilaturahmi dengan sesama etnis Minang lainnya, dengan adanya pengorganisasian kelompok Minang yang dinaungi oleh Persatuan Keluarga Paninggahan di daerah Sako Kota Palembang ini. Perantau etnis Minang yang berada di kota Palembang dengan budaya etnis Minang tetap muncul dari diri mereka sebagai orang yang mempunyai identitas orang Minang.

Pola perilaku merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan dalam tindakan yang dilakukan etnis minang dalam memperoleh pengakuan dari penduduk lain yang berasal dari latar etnis yang berada di Kota Palembang, seperti yang dilakukan oleh komunitas Persatuan Keluarga Paninggahan (PKP) memerlukan pengenalan serta pola perilaku demi mendapatkan respon positif dimasyarakat etnis Palembang.

Politik identitas etnis lebih banyak menimbulkan perpecahan pada masa orde baru dan sayangnya negara absen untuk melindungi rakyatnya. Perilaku politik identitas yang tidak memperhatikan etika dalam berkomunikasi di dalam lingkungan sosial sangat rentan, karena adanya penolakan-penolakan. Seperti halnya yang terkemuka dari pengamatan Lucian W Pye (1993) “terbukti, guncangan politik karena ledakan politik etnisitas sudah kita rasakan pengaruhnya. Celaknya negara absen dalam melindungi warganya. Hal ini nampak dalam pertikaian Dayak-Madura, peristiwa kekerasan politik Mei 1998 di Jakarta, pengusiran etnis Buton-Bugis dan Makassar (BBM) di Ambon”.

Pola tindakan dan perilaku sebagai orang pendatang di tanah Palembang, etnis Minang sangat perlu memperhatikan lebih mendalam dalam melakukan rekognisi sosial dalam menjalankan politik identitas di tengah masyarakat mayoritas agar tidak menimbulkan penolakan dengan tindakan-tindakan yang merugikan. Pola tindakan yang diharapkan dapat melecutkan identitas ke permukaan umum bahwa etnis Minang yang hadir dan menetap di kota Palembang sebagai kelompok Keluarga Paninggahan sebagai kelompok orang yang berasal dari tanah Minang dan datang ke kota Palembang dengan tujuan dan niat yang baik yakni “merantau”. Politik identitas yang dilakukan semata agar dapat menerapkan budaya dan kebiasaan sehari-hari yang telah melekat di dalam diri sebagai etnis Minang, walaupun ditanah rantau masih bisa merasakan nuansa nilai-nilai dan praktik budaya Minang. Merantau bagian dari kehormatan diri orang Minang, kenyamanan dan penghidupan yang layak di daerah rantau bagian dari misi hidup dengan tidak meninggalkan atau melupakan budaya Minang.

Perlu ditekankan di sini bahwa keberhasilan para perantau bukan hanya semata keberhasilan ekonomis, tetapi kebanggaannya terletak bagaimana mereka ‘berbagi’ dalam bentuk praktik filantropi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat minang dalam rangka membangun kampung halamannya. Filantropi yang dilakukan para perantau sangat penting sebagai alat transformasi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dalam pengembangan ekonomi umat, khususnya dengan menggunakan instrumen filantropi Islam. Didorong oleh pandangan hidup adat Minangkabau dan didesak oleh kebutuhan ekonomi, mereka meninggalkan kampung halaman pergi ke rantau menjadi keharusan. Merantau bukan berarti melepaskan identitas sosial, melainkan semacam upaya, ikhtiar meraih kehidupan yang layak.

Orientasi merantau untuk memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik secara filosofis menurut adat adalah untuk kembali ke kampung, tempat ia dilahirkan atau tanah asal keluarganya. Ada nilai yang dibawa ke rantau orang. Sanak saudara

ditinggalkan, di rantau harus mendapat gantinya. Hiyu bali balanak bali, ikan panjang bali dahulu. Ibu cari dunsanak cari, induak samang cari dahulu (Hiyu dibeli, balanak pun dibeli, ikan panjang beli dahulu; Ibu dicari dunsanak dicari, induk semang cari dahulu). Secara simbolik, merantau bukan berarti kehilangan segala sesuatu yang ada di kampung halaman. Lebih dari itu, harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Inggok mancakam, tabang manumpu (Hinggap mencekam dahan, jika terbang bertumpu dengan dahan tersebut).

Sebagai bentuk rekognisi sosial dalam melakukan politik identitas oleh keluarga PKP di daerah Sako kota Palembang sebagaimana dimaksudkan dari politik identitas ini agar budaya etnis Minang yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat diterima oleh masyarakat kota Palembang terkhusus sekitaran Sako walaupun dengan budaya yang berbeda. Sehingga identitas etnis Minang tetap muncul dalam diri keluarga Paninggahan dan tetap lestari.

Budaya Palembang yang berbeda dengan budaya Minang dengan adat dan bahasa "*wong Palembang*" yang menjadi ciri khasnya sebagaimana sepintas dipaparkan dalam latar belakang. Orang Palembang sebagai tempat dan wilayah yang menjadi tempat budaya *wong Palembang* lestari dan hidup, sebagai identitas masyarakat Palembang yang kultural. Tetap adanya usaha untuk mempertahankan dan melestarikan budaya Palembang itu sendiri dari penggerusan nilai-nilai budaya Palembang. Hal demikian juga menjadi bagian dari etnis Minang dalam melakukan rekognisi politik identitas supaya nilai-nilai budaya etnis Minang dapat diakui dan diperbolehkan untuk dipakai atau digunakan oleh kelompok etnis Minang itu sendiri. Dalam memperoleh pengakuan dari masyarakat etnis Minang Persatuan Keluarga Painggahan melakukan ;

A. Etnis Minang berusaha mengenalkan adat budaya minang dikota Sako Palembang Masyarakat menyambut baik budaya etnis Minang, karena baginya *mensupport* warga yang merantau itu amat baik. Adapun pola perilaku yang dikeluarkan dari etnis non minang menyambutnya dengan suka cita, karena masyarakat non minang beranggapan semua dilakukan demi mengenalkan adat budaya minang dikota Palembang terkhusus yang dilakukan oleh Persatuan Keluarga Paninggahan.

B. Etnis Minang melakukan Pengajian, pelatihan bahasa Minang, baraleh Minang Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh PKP demi mempersatukan masyarakat rantau antara lain: pengajian, pelatihan bahasa minang, baraleh minang, dan lain-lain dengan tujuan sebagai pengikat tali silaturahmi antara masyarakat Minang yang satu dengan yang lainnya. Sebagai penyemangat cinta akan negeri dan nilai budaya luhur khususnya adat Minangkabau.

C. Saling membantu dan meramaikan dalam acara pesta pernikahan atau acara kemeriahan dan sebagainya.

Jika salah satu keluarga ada yang mengadakan pernikahan atau undangan tasyakuran maupun kemeriahan lainnya di suatu rumah atau tempat, komunitas etnis Minang PKP akan saling membantu satu sama lain.

D. Evaluasi kegiatan

Tahap terakhir yaitu evaluasi, pada tahap ini mencakup penilaian, penyusunan, pelaksanaan dan hasil dari yang telah diterapkan. Evaluasi menentukan apakah pola perilaku yang dilakukan oleh etnis Minang diperlukan untuk mengukur keberhasilan yang telah dicapai serta untuk menentukan apakah pola perilaku identitas yang digunakan akan dipakai kembali atau menggunakan strategi yang baru. Ada tiga macam langkah dasar untuk mengevaluasi yaitu: meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar, mengukur kinerja, dan mengambil tindakan korektif.

Beberapa tindakan yang dilakukan di atas sudah menunjukkan bahwasanya etnis Minang dari Persatuan Keluarga Paningahan telah diterima oleh masyarakat kota Palembang yang ada di daerah Sako. Keluarga Paningahan dapat hidup dengan damai bersama dengan masyarakat kota Palembang dan tetap dapat melestarikan budaya Minang kepada komunitas etnis Minang itu sendiri dan bahkan memperkenalkan budaya Minang kepada masyarakat setempat tanpa harus memunculkan penolakan dari masyarakat Palembang. Nilai-nilai budaya Minang ataupun persaingan etnis di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang Minang dapat diketahui dengan identitas diri mereka sebagai orang Minang dan masyarakat etnis/budaya Palembang tetap dengan identitas diri sebagai *wong Palembang*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis Rekognisi Sosial Pada Komunitas Minang Dalam Pembentukan Politik Identitas mengenai yaitu :

Diskursus identitas dalam masyarakat di Kota Palembang, dalam memandang etnis minang bahwasanya atribut identitas dan kultural berperan sebagai perekat dari kolektivitas kelompok dari setiap orang yang menjadi atribut identitas dan nilai-nilai kultural yang dianggap melekat dalam identitas. Maka dari itu etnis Minang berusaha memperkenalkan adat budayanya didalam lingkungan yang mayoritas non etnis minang, dan dari PKP inilah etnis minang dikota rantau tetap bisa menjaga adat budaya dan saling bersilaturahmi dengan sesama etnis minang lainnya dengan melakukan komunikasi.

Dalam memperoleh pengakuan dari masyarakat, etnis minang berusaha mengenalkan adat budaya minang dikota Sako Palembang, masyarakat menyambut baik budaya etnis Minang, karna baginya mensupport warga yang merantau itu amat baik. Kegiatan yang dilakukan oleh PKP demi mempersatukan masyarakat rantau antara lain: pengajian, pelatihan bahasa minang, baraleh minang, dengan tujuan sebagai pengikat tali silaturahmi antara masyarakat Minang yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Min Hajul. “Politik Identitas Santri”. *Skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017)
- Anugrah, M., & Syawaludin, M. (2021). Politik Identitas: Peran Politik Etnis Tionghoa dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 2(2), 107-117. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/ampera.v2i2.7966>
- M.Amin nurdin dan Ahmad Ridho. *Identitas dan Kebanggaan menjadi orang Minangkabau Pengalaman perantau Minang asal Nagari Sulit air*. (Ciputat : Hippius. 2020).
- Rozi, Syafwan. “Konstruksi Identitas Agama dan Budaya Etnis Minangkabau di Daerah Perbatasan (Perubahan Identitas dalam Interaksi Antaretnis di Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat)”.*Disertasi* (Bandung: Program Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2013)
- Sari, Indah. “Politik Identitas Komunitas Bali di Desa Mukti Jaya Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin”.*Skripsi* (Palembang: Program Studi Politik Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020)
- Shandi, Wira Rikho. “Politik Identitas Partai Islam (Studi Partai Keadilan Sejahtera)”, *skripsi* (Tanjung Pinang: Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2014)
- Syarifuddin, Latif. “Meretas Hubungan Mayoritas-Minoritas Dalam Perspektif Nilai Bugis”. *Jurnal Al-Ulum* Volume 12, Nomor 1, Juli 2012
- Zharfandy, Irfan. “Pengaruh Politik Identitas Terhadap Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013”.*Skripsi* (Jakarta: Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)